



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Industri PBK Berperan
Penting Dorong Sektor Rill**

**Kinerja Melejit Tapi
Harga Timah Terjepit**

**Kompetensi WPB Bakal
Terdaftar di BNSP**



**Membangun Asa
Industri PBK**



- 4-9 **Berita Utama**
Membangun Asa Industri PBK
- 10-11 **Pasar Fisik**
Kinerja Melejit Tapi Harga Timah Terjepit
- 12-13 **Resi Gudang**
SRG Karet Solusi Bagi Petani

Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

22-24 KomiKita

Ketika Mahasiswa jadi 'Duta SRG'



24-25 Kolom

Potensi Komoditi Timah Sebagai Subjek SRG



26-27 Kiprah

Kisah Sukses Sang Pengelola SRG Batola



14-15 Agenda Foto

16-17 Aktualita

- Pialang Berjangka Wajib Sediakan Layanan SITNa
- Kompetensi WPB Bakal Terdaftar di BNSP
- Bikin Petani Pintar, Bappebti Siap Luncurkan SRG Mobile
- BKDI Serius Garap Pasar Karet dan Kontrak Berjangka Timah

18 Analisa

19 Breaking News

20 Info

21 Info SRG



Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Sutiriono Edi

Redaktur
Marthin Simanungkalit

Penyunting/ Editor
Taufik KS
Annisa F Wulandari
Vera Hendrias

Fotografer
Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Foto : Pegawai Bappebti mendapatkan pelatihan penulisan press release, artikel dan fotografi.

Lambat namun pasti, industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia akan menjadi pasar pembentukan harga sejumlah komoditi unggulan ekspor.

Mimpi dan optimisme itu setidaknya datang dan terungkap dari pertemuan tahunan pelaku perdagangan berjangka komoditi yang digelar pada 20 Januari 2016, lalu, di Jakarta. Pada pertemuan yang mengambil tema: "Peningkatan Transaksi Multilateral yang Berintegritas dan Berdaya Saing," itu, Bappebti selaku badan pengawas dan pembina mengungkapkan kinerja pelaku perdagangan berjangka komoditi selama tahun 2015, mencapai pertumbuhan 15,47 % dengan volume transaksi 1.280.801 lot. Sedangkan pada periode 2014 hanya mencapai 1.109.175 lot.

Dan dapat digambarkan, *market share* kontrak berjangka komoditi primer atau lazim disebut kontrak berjangka multilateral terhadap kontrak berjangka bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif- SPA, dalam tiga tahun pun terakhir terus meningkat. Yaitu dari 14,26 % pada 2012, menjadi 18,37 % pada 2013; 18,03 % pada 2014; dan 19,43 % pada 2015.

Kontrak berjangka multilateral yang menjadi andalan bursa berjangka Indonesia saat ini dan mencapai volume terbesar adalah crude palm oil- CPO (CPOTR) mencapai 439.635 lot, kopi robusta (RCF) 233.712 lot, dan emas 250 gram (GOL 250) 129.023 lot.

Sementara itu, pasar fisik timah yang juga bagian dari perdagangan berjangka

komoditi pada tahun 2015 tercatat sebesar 67.562,46 ton atau mencapai nilai sebesar US\$ 1.109.759.113.

Di samping pencapaian kuantitatif pelaku perdagangan berjangka komoditi itu, mimpi dan optimisme terhadap industri ini juga datang dari seorang ekonom dan sekaligus Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional- KEIN, Dr. Hendri Saparini.

Menurutnya, peran industri perdagangan berjangka komoditi sangat penting di sebuah negara. Sebab, bursa berjangka yang merupakan infrastruktur menyediakan mekanisme manajemen risiko seperti *prices discovery*, *hedging* dan lain sebagainya, sangat dibutuhkan sektor riil serta untuk memperlancar alur perekonomian.

"Presiden telah menginstruksikan kepada jajaran menteri termasuk KEIN, untuk mendorong perkembangan sektor riil. Jadi ini akan menjadi salah satu masukan penting saya kepada pak Presiden Jokowi. Karena yang itu tadi, industri ini dapat mengelola risiko yang bakal dihadapi sektor riil," begitu kutipan Hendri Saparini.

'Nah, jika industri perdagangan berjangka komoditi telah masuk 'radar' pemerintah dan menjadi salah satu prioritas di dalam mendorong dan melindungi sektor riil, maka mimpi dan optimisme itu tinggal menunggu waktu. Semoga!

Salam!



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi SRO dan Aspebtindo, meninjau nota kesepahaman MoU kerjasama dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengembangan di bidang PBK.

Membangun Asa Industri PBK

Tahun 2016 menjadi tahun persatuan bagi seluruh pelaku dan pihak yang terkait dengan industri perdagangan berjangka komoditi. Langkah ini sebagai upaya mampu berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi Asean.

Arti filosofi sapu lidi menggambarkan sebuah persatuan. Jika satu lidi akan mudah dipatahkan, tapi seikat lidi jauh lebih sulit untuk dipatahkan. Begitu pun dengan industri PBK saat ini. Satu sama lainnya saling berkoordinasi dan mendukung. Tidak mungkin dapat berjalan sendiri. Karenanya, para pelaku dan pihak terkait harus selalu menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai sebuah keberhasilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rabu, 20 Januari 2016 lalu, dalam acara Pertemuan Tahunan Bappebti dengan Pelaku Industri PBK Tahun 2016, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MoU kerjasama dalam rangka pembinaan,

pengawasan dan pengembangan di bidang PBK.

MoU itu dilakukan oleh Bappebti bersama-sama dengan *self-regulatory organization*- SRO yang terdiri dari bursa berjangka- Jakarta Futures Exchange (JFX), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), lembaga kliring berjangka- PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indonesia Clearing House (ICH), dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia-Aspebtindo.

Dengan MoU tersebut semua pihak sepakat untuk bersinergi mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dimaksudkan agar PBK dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan harga- *price*

discovery dan referensi harga- *price reference* komoditi di dunia, seperti kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet dan lainnya.

"Kalau bercerai berai maka tidak akan bisa jalan. Jadi, semua pihak harus saling mendukung dan menguatkan edukasi peningkatan kontrak multilateral," tutur Kepala Bappebti, Sutriono Edi, yang menjadi salah satu narasumber di acara tersebut.

Dia menjabarkan, beberapa strategi edukasi akan mulai dilakukan pada tahun ini. Satu contoh, semua pihak akan bekerjasama melakukan edukasi industri PBK melalui iklan di media, misalnya di televisi. "Jadi, edukasi itu ada yang sifatnya bersama-sama, ada juga yang bersifat

masing-masing."

Lebih jelasnya dia bilang, persatuan dalam lingkaran industri PBK bersifat kerjasama dan kompetitif. "Kerjasama tetap terjalin, tapi masing-masing pihak memiliki daya saing. Pelaku usaha dapat melakukan inovasinya sendiri dan Bappebti sebagai koordinatornya," jelas Sutriono.

Selain itu, dalam acara yang bertajuk; "Peningkatan Transaksi Multilateral yang Berintegritas dan Berdaya Saing" ini, Sutriono Edi, mengungkapkan, akan mendorong peningkatan industri PBK melalui tiga fokus. Pertama, peningkatan transaksi multilateral. Kedua, peningkatan integrasi industri PBK. Terakhir, peningkatan iklim usaha yang kondusif.

Sementara itu, Ketua Aspebtindo, F. Wishnubroto, sangat antusias dengan ditandatanganinya MoU kerjasama semua pihak di industri PBK tersebut. "Ini menjadi bentuk suatu kesepahaman agar semua pelaku industri PBK dapat bersinergi menjadi satu kesatuan, untuk bagaimana bisa menjalankan industri PBK yang berintegritas dan berkembang di masa depan."

Dia menambahkan, dengan terbentuknya Aspebtindo, maka dua organisasi yang sebelumnya ada di lingkungan perdagangan berjangka, yaitu Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia- APBI dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia- IP2BI telah resmi dilebur. "Pendirian asosiasi ini (Aspebtindo) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, tentang PBK," ujar Wishnu.

MoU tersebut juga menjadi perekat yang baik antara dua bursa berjangka di Indonesia. Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang dan Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, telah mengungkapkan komitmen mereka untuk menjalin kerjasama yang baik antara dua bursa berjangka tersebut.

Transaksi Meningkat

Selama 2015, transaksi PBK mencapai 6.590.530 lot atau meningkat 7,11 % dibandingkan transaksi pada 2014 yang sebesar 6.153.009 lot. Transaksi komoditi primer (multilateral) di bursa berjangka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari volume transaksi di 2015 yang mencapai 1.280.801 lot atau meningkat 15,47 % dibandingkan periode yang sama tahun 2014 yang sebesar 1.109.175 lot.

Sementara pertumbuhan *share* transaksi multilateral terhadap transaksi bilateral (SPA) dari tahun ke tahun juga terus meningkat, yaitu 14,26 % pada 2012; 18,37 % pada 2013; 18,03 % pada 2014; dan 19,43 % pada 2015.

Dengan demikian, periode 2014 hingga 2015 terjadi peningkatan *share* transaksi sebesar 7,76 %. Kontrak multilateral yang paling banyak diperdagangkan adalah CPO (CPOTR) 439.635 lot, kopi robusta (RCF) 233,712 lot, dan emas 250 gram (GOL 250) 129,023 lot.

"Melihat peningkatan yang positif ini, saya optimis investasi di perdagangan berjangka cukup menarik dan dapat didorong sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Bappebti juga akan mendorong optimalisasi peran *commodity desk* pada perusahaan pialang dan peningkatan fasilitas oleh kantor cabang seperti sistem, sarana promosi, dan SDM yang handal guna mendukung likuiditas transaksi di bursa. Sutriono pun mengaku telah berkoordinasi dengan SRO untuk melakukan sinkronisasi kegiatan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif dan terarah.

Lebih jauh, menurutnya, investasi di perdagangan berjangka masih cukup menarik dan dapat didorong sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional meningkat. Untuk itu, pada Semester I Tahun 2016 ini diharapkan kontrak-kontrak baru berbasis komoditi primer unggulan ekspor Indonesia dapat diperdagangkan di bursa



berjangka komoditi, seperti teh, rumput laut, kopra, dan karet serta komoditi syariah.

“Namun demikian, komoditi yang saat ini telah diperdagangkan di bursa akan terus diperkuat dan dioptimalkan di bursa seperti kopi, emas, kakao, CPO, olein, dan timah,” imbuhnya.

Adapun dalam rangka meningkatkan integritas industri PBK, Bappebti akan menerbitkan peraturan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK. Di antaranya penyempurnaan peraturan tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Perdagangan- *trading rules* Sistem Perdagangan Alternatif- SPA, dan pengaturan tenaga marketing. Kode Etik Asosiasi juga akan diterbitkan sebagai pedoman bagi seluruh anggota Aspebtindo untuk menciptakan perilaku anggota asosiasi sesuai norma dan aturan.

“Kami akan membuat kerangka regulasi yang selaras, menjamin kepastian hukum, adil dan transparan, serta tata kelola kelembagaan industri PBK yang dapat memberikan pelayanan prima dan pemahaman yang selaras bagi pengguna jasa,” jelas Sutriyono.

Di tahun 2015, Bappebti telah melakukan penegakan hukum dengan memberikan pengenaan sanksi peringatan tertulis kepada 13 pialang berjangka, pembekuan kegiatan usaha pialang berjangka terhadap 5 perusahaan, dan pencabutan izin usaha pialang berjangka sebanyak 1 perusahaan.

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Bappebti juga akan mengeluarkan aturan peningkatan kompetensi standar untuk Wakil Pialang Berjangka- WPB yang akan diterapkan untuk seluruh calon WPB.

Sedangkan untuk meningkatkan iklim usaha, Bappebti memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus perizinan di bidang PBK. Saat ini terdapat sepuluh jenis perizinan dan persetujuan yang telah terkoneksi dengan sistem



Inatrade Kemendag dan dapat diurus secara online.

Dalam rangka pelayanan publik yang prima, Bappebti telah mengatur pedoman penanganan pengaduan serta menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan secara online yang terhubung antara nasabah, perusahaan pialang, bursa berjangka, dan Bappebti.

Di samping itu, Bappebti juga mendorong upaya demutualisasi bursa serta optimalisasi pemanfaatan perluasan cakupan komoditi yang diperdagangkan di bursa guna memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya di industri perdagangan berjangka komoditi.

Untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap industri PBK, Bappebti juga mendorong pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada investor. Seperti, Sistem Informasi Transaksi Nasabah- SITNa yang digagas KBI dan JFX. Sistem ini bermanfaat memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik kepada investor, sehingga investor mampu mengecek transaksinya sendiri sebagai bentuk pengawasan oleh investor dan

pialang.

Ke depannya, implementasi SITNa diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga sehingga menumbuhkan kepercayaan nasabah bahwa transaksi yang dilakukan telah diregistrasikan, dilaksanakan, dan dilaporkan.

Resolusi

Pencapaian transaksi kontrak multilateral dan bilateral di JFX pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk kontrak multilateral naik 69,88 %. Sedangkan kontrak bilateral juga naik 11,61 %.

Dari presentasi tertulis Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, juga disebutkan beberapa refleksi JFX pada tahun 2015. Diantaranya, JFX telah melakukan konsolidasi internal dan eksternal; kajian potensial kontrak- Kontrak baru, baik *soft commodity* maupun *financial based*; penyesuaian PTT Bursa; sosialisasi dan edukasi yang diwujudkan dalam peningkatan kegiatan JFX Center, edukasi kepada anggota bursa, media dan masyarakat umum; serta peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap anggota

bursa.

Selain itu, JFX juga memiliki beberapa resolusinya di tahun 2016. Diantaranya, peningkatan volume dan mutu transaksi perdagangan; volume kontrak multilateral naik 250 %; volume kontrak bilateral naik 120 %; penyelesaian kajian dan peluncuran Pasar Fisik Terorganisir; peningkatan likuiditas market terhadap kontrak-kontrak yang ada; dan kerjasama dengan bursa komoditi luar negeri.

Dan tak kalah penting, JFX juga akan berupaya meningkatkan perlindungan nasabah dan anggota bursa: peningkatan image positif Industri PBK dan JFX; peningkatan kualitas layanan terhadap anggota bursa; mengupayakan terciptanya sinkronisasi antar kementerian untuk kemajuan Industri PBK; peningkatan kepatuhan anggota bursa terhadap peraturan PBK yang berlaku.

Senada dengan itu, Dirut BKDI, Megain Widjaja, dalam presentasi tertulis juga menyebutkan beberapa catatan penting yang dicapai sepanjang tahun 2015. Untuk total transaksi di BKDI selama tahun 2015 mencapai 585,729 lot. Dari total transaksi itu, tercatat volume transaksi timah pada tahun 2015 mencapai 67.562,46 ton atau mencapai nilai sebesar US\$ 1.109.759.113. Sedangkan untuk peningkatan transaksi emas mencapai 38 % dari tahun 2014.

Selain itu, BKDI juga tercatat sebagai tuan rumah ITCE 2014 dan 2015. Saat ini, total member BKDI telah mencapai 130 member (104 member lokal dan 26 member asing). Dengan semua catatan itu, BKDI berhasil meraih peringkat 49 sebagai bursa terbaik di dunia.

Di tahun 2016, BKDI juga berkomitmen akan melakukan *launching* kontrak fisik karet pada Juni 2016. BKDI juga akan meluncurkan kontrak berjangka timah. “Kami juga akan melakukan perbaikan infrastruktur untuk *financial contract* dan meningkatkan *awareness* pasar komoditi,” beber Megain.



Integritas Keuangan

Lembaga kliring memiliki peranan untuk menjaga integritas keuangan di industri PBK. Karenanya, pada tahun 2015, ada beberapa tindakan yang dilakukan PT. KBI dalam *law enforcement* (penegakan hukum) yang terkait dengan integritas keuangan.

Pertama, PT. KBI telah mengawasi pemenuhan kewajiban keuangan anggota kliring (AK) pialang. Dalam tindakannya, KBI telah 4 kali memberi peringatan kepada AK; telah 8 kali memberi teguran kepada AK; telah 2 kali membekukan keanggotaan AK; telah 2 kali mencabut keanggotaan AK.

“*Shortage* AK rata-rata setiap hari yaitu 9 AK senilai Rp 4,5 miliar. Rata-rata di-*suspend* 2 AK dan hampir seluruhnya dicabut pada hari yang sama,” jelas Dirut PT KBI, Tris Sudarto dalam presentasi tertulisnya.

Selain itu, KBI juga terus mendorong pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penyimpanan Dana Margin Anggota Kliring dengan proporsi 70 : 30 (sesuai PerKa Bappebti No. 117 Tahun 2015).

KBI juga mencatat, tingkat ketaatan dari 58 AK pialangnya sebagai berikut:

100 % taat terdiri dari 7 AK; 71 % s.d. 99 % taat yaitu 38 AK; 31 % s.d. 70% taat yaitu 7 AK; 1 % sd. 30 % taat yaitu 5 AK; tidak taat (0 %) hanya 1 AK.

Selain itu, pada 10 November 2015, KBI juga telah meluncurkan SITNa (Sistem Informasi Transaksi Nasabah). Dengan SITNa, setiap nasabah yang melakukan transaksi kontrak berjangka dapat juga memonitor hasil transaksinya secara *real time* dari waktu ke waktu.

Tercatat hingga saat ini yang telah mendaftar ke SITNa sebanyak 47 pialang dari total 58 AK pialang. Sedangkan yang telah memberikan hak aksesnya kepada nasabah sebanyak 15 pialang. Dan, jumlah akun nasabah yang telah diberi akses sebanyak 2.275. Sedangkan website SITNa telah diakses hingga 14.024 kali.

Di tahun 2016, KBI akan melakukan beberapa hal untuk mengembangkan PBK, Resi Gudang, dan maupun Pasar Fisik. Diantaranya, pertama, lebih mengefektifkan penggunaan SITNa dengan cara sosialisasi kepada calon investor dan iklan di media masa, sehingga investor bisa mengecek transaksinya dan memudahkan pialang untuk meyakinkan nasabah investor.



Kedua, *pre margining* dan pembatasan transaksi. Pengembangan sistem ini bertujuan memberikan opsi dan kemampuan tambahan kepada sistem *risk management* PT KBI, untuk menerapkan pola pengawasan, pola pengambilan keputusan dan interkoneksi antar sistem yang lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan *human error*.

Ketiga, mengimplementasikan SPT-SPA. Ini merupakan sistem yang dibangun untuk memberikan kemampuan kepada otoritas dan SRO untuk melaksanakan pemantauan transaksi SPA, dilakukan dengan mengakses data ke pedagang penyelenggara.

Keempat, sinergi BUMN, KBI rencananya akan berupaya mengembangkan sinergi dengan BUMN lain dengan pola saling menguntungkan, dalam bentuk kerjasama di bidang jasa untuk mengembangkan pasar fisik komoditas nasional, dan meningkatkan peran BUMN komoditas dalam transaksi bursa berjangka.

Terakhir, KBI rencananya akan mengembangkan produk Derivatif Resi Gudang- DRG yang dapat ditransaksikan di bursa berjangka.

Sementara itu, ICH juga melakukan hal yang serupa dalam melakukan penegakan integritas keuangan di industri PBK. Dirut ICH, Nursalam, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan margin sesuai dengan PerKa Bappebti No. 117 Tahun 2015. Selain itu, ICH juga telah menetapkan jaminan margin dalam bentuk *cash* dan bank *guarantee*, dan melakukan pengawasan registrasi transaksi secara online.

Di tahun 2016, ICH rencananya akan melakukan beberapa hal. Diantaranya, pembelian sistem kliring; meningkatkan intensitas pemberitaan ICH di media dengan cakupan nasional dan internasional; bersama bursa menciptakan kontrak berjangka yang *liquid*; melakukan pelatihan teknis bersama regulator kepada masyarakat umum, media dan civitas akademika; bersama bursa berjangka meningkatkan

pengawasan terhadap semua anggota; dan meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan sertifikasi dan seminar.

Citra Positif

Di tahun 2015, Aspebtindo yang telah terbentuk dan telah melakukan beberapa kegiatan. Diantaranya, penyusunan kode etik asosiasi, pelatihan calon Wakil Pialang Berjangka di Solo dan Bandung, serta ikut berpartisipasi dalam Trade Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di JIEXPO Kemayoran.

Untuk tahun 2016, Ketua Aspebtindo, F. Wishnubroto, mengatakan beberapa program kegiatan yang telah disusun

dan akan dilaksanakan. Diantaranya, peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan, pengembangan transaksi kontrak berjangka (Multilateral dan SPA) melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi, peningkatan kemampuan SDM dalam PBK.

Selain itu, Aspebtindo juga akan meningkatkan pelayanan dan penegakkan hukum; melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan produk/kontrak untuk transaksi kontrak berjangka; dan meningkatkan Integritas PBK. "Kami juga akan berupaya meningkatkan citra positif Industri PBK melalui media kehumasan," tandas F. Wishnubroto.

Perkembangan Pasar Fisik Timah BKDI 2015

JUMLAH PERUSAHAAN PENJUAL	31
JUMLAH PERUSAHAAN PEMBELI	25
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN TIMAH	
30 Aug 2013 – 31 Dec 2013	
PERDAGANGAN	
VOL	18.290 M.TON
NILAI	\$ 423.642.593,73
EKSPOR	
VOL	18.080 M.TON
NILAI	\$ 418.713.575,01
01 Jan 2014 – 31 Dec 2014	
PERDAGANGAN	
VOL	↑ 57.010,08 M.TON
NILAI	↑ \$ 1.261.543.677,42
EKSPOR	
VOL	↑ 54.465 M.TON
NILAI	↑ \$ 1.213.693.324,35
01 Jan 2015 – 31 Dec 2015	
PERDAGANGAN	
VOL	↑ 67,562 M.TON
NILAI	↑ \$ 1,109,759,112.82
EKSPOR	
VOL	↑ 69,854 M.TON
NILAI	↑ \$ 1,154,140,086.37
ANGGOTA BURSA PER 22 NOV 2015	
ET (TERBARU) & SERTIFIKAT C & C	8 PERUSAHAAN
ET (TERBARU) & IUP BELUM C & C	4 PERUSAHAAN
ET (BELUM PERHARUAN) & SERTIFIKAT C & C	2 PERUSAHAAN

Industri PBK Berperan Penting Dorong Sektor Rill

Ekonom Dr. Hendri Saparini, beberapa saat setelah dilantik menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada Rabu (20/01/2016) di istana negara, menjadi salah satu pembicara utama pada pertemuan tahunan pelaku industri perdagangan berjangka komoditi yang diselenggarakan Bappebti di Jakarta.

Dalam kaitan itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia, ini, mengutarakan pandangannya tentang industri perdagangan berjangka komoditi kepada **Buletin Bappebti**. Berikut ini petikannya:

T: Bagaimana pandangan Ibu terhadap industri perdagangan berjangka komoditi saat ini?

J: Industri perdagangan berjangka komoditi ini sangat penting. Karena industri ini 'kan merupakan salah satu infrastruktur yang diperlukan sebuah Negara untuk kelancaran perekonomiannya. Hanya saja, prioritasnya apa dan mau ditugasi seperti apa oleh Negara belum tampak sampai saat ini.

Tetapi melihat konsen pemerintah saat ini yang fokus untuk menggerakkan sektor riil, industri perdagangan berjangka komoditi menjadi sangat penting.

Karena industri ini menyediakan mekanisme manajemen risiko seperti prices discovery, hedging dan lain sebagainya yang dibutuhkan sektor riil.

T: Sebagai salah satu Anggota KEIN, apa yang akan Ibu sarankan kepada Presiden?

J: Industri perdagangan berjangka komoditi ini akan menjadi salah satu masukan KEIN kepada presiden. Karena apa? Siapa pun presidennya tidak akan mungkin memahami semua hal dan mengetahui instrumen yang dipentingkan dalam mendorong



sektor riil.

Tetapi yang pasti, presiden telah menginstruksikan kepada jajaran menteri termasuk KEIN untuk mendorong perkembangan sektor riil. Jadi ini akan menjadi salah satu masukan penting saya kepada pak Presiden Jokowi.

Karena yang itu tadi, industri ini dapat mengelola risiko yang bakal dihadapi sektor riil.

T: Apa pandangan Ibu terhadap keterlibatan BUMN di industri perdagangan berjangka komoditi ini?

J: Saya pikir BUMN perlu masuk dan aktif di industri ini. Hanya saja sampai saat ini masih banyak aturan-aturan yang memberatkan BUMN jika terjadi kegagalan atau risiko.

Jadi, dari sisi BUMN mereka tentunya tidak mau dipersalahkan. Karena itu, kami pun akan mencoba melakukan sinkronisasi kebijakan ini, sehingga BUMN ke depan benar-benar dapat menjalankan manajemen risiko di industri perdagangan berjangka komoditi.

SANKSI 2012 - 2015
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



JUMLAH SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA	65
2012	Rp. 115.400.000
2013	↑ Rp. 310.000.000
2014	↓ Rp. 288.200.000
2015	↑ Rp. 353.500.000

PENYIDIKAN 2012 - 2015	1
2012	1
2013	↓ 0
2014	↑ 2
2015	↑ 3



Kinerja Melejit Tapi Harga Timah Terjepit

Transaksi timah di BKDI hingga akhir tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan. Namun, sangat disayangkan harga timah dunia justru sedang melorot tajam.

Pasar fisik timah yang diselenggarakan Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia- BKDI sejak 30 Agustus 2013 lalu, makin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara produsen dan sekaligus pasar timah dunia. Itu terbukti dari total transaksi timah yang terus meningkat hingga akhir tahun 2015. Data resmi BKDI yang diperoleh Buletin Bappebti, pada awal Februari, ini, tercatat volume transaksi timah sepanjang 2015 mencapai 13.496 lot. Jumlah itu naik sekitar 19 % dari transaksi timah tahun 2014 yang hanya mencapai sebanyak 11.373 lot. Dengan volume transaksi pasar fisik timah sebesar 13.496 lot, total ekspor timah murni batangan tercatat sebesar 67.480 ton, atau sebesar 99.63 % dari

seluruh total transaksi timah di BKDI. Transaksi pasar fisik timah itu dihasilkan dari 31 *smelter* dan 25 *buyer* anggota BKDI. Sedangkan untuk timah murni batangan yang dipasarkan di domestik tercatat sebesar 245,82 ton atau 0.37 % dari total keseluruhan transaksi timah BKDI. Volume perdagangan timah murni batangan BKDI untuk pasar lokal ini cenderung kecil karena baru di luncurkan pada 29 Juli 2015, lalu. Head of Business Development BKDI, Stella Novita Lukman, dalam penjelasannya mengatakan, sepanjang tahun 2015 tercatat ada sebanyak 12 negara tujuan ekspor. Masing-masing, Singapura, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Korea, India, Taiwan, Italia, China,

Spain, dan Malaysia.

“Singapura merupakan negara tujuan terbesar untuk ekspor timah BKDI, yakni mencapai 39.685,73,” ujar Stella. Lebih jauh diutarakan Stella, dari sisi tren harga timah tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tajam. BKDI mencatat, tren harga timah sepanjang 2015 rata-rata berada di level US\$ 16.295 per ton, sedangkan untuk tahun 2014 berada di level US\$ 22.224 per ton. “Jadi, depresiasi harga timah sepanjang tahun 2015 mencapai US\$ 5.929 per ton,” katanya.

“Salah satu penyebab turunnya harga timah dunia di tahun 2015, lalu, disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” kata Stella. Penurunan rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2014 ke 2015 mencapai sekitar 12,74 %. Sehingga hal ini pun turut berimbas dengan melemahnya harga timah sebesar 9,52 %, tambah Stella.

“Selain faktor melemahnya nilai tukar dolar, penurunan harga timah juga disebabkan melimpahnya stok timah dunia, terutama di Tiongkok. Di sisi lain, kenaikan stok itu tidak diimbangi dengan permintaan,” beber Stella.

Meski demikian, akunya Stella N. Lukman, harga timah di BKDI relatif lebih baik dibandingkan dengan dua pasar timah dunia lainnya. Harga rata-rata timah BKDI di tahun 2015 lalu, berada dikisaran 16.295 per ton. Sedangkan di London Metal Exchange- LME berada di posisi US\$ 16.070 per ton, dan Kuala Lumpur Tin Market- KLTM di posisi US\$ 16.016 per ton. “Jadi harga timah di kita masih lebih baik, dibandingkan dua pasar timah yang selama ini menjadi acuan harga, yakni sebesar 16.295 per ton,” terang Stella.

Program 2016

D i tahun 2016, BKDI ingin terus meningkatkan eksistensinya sebagai bursa timah di Indonesia. BKDI ingin perdagangan timahnya, baik itu untuk pasar lokal maupun untuk tujuan ekspor terus meningkat.

Karenanya, kata Stella, BKDI akan terus meningkatkan sosialisasi dan berupaya untuk mendapatkan calon pembeli. Salah satu caranya, tahun ini BKDI merencanakan kembali menggelar Indonesia Tin Conference & Exhibition- ITCE.

“Tahun ini merupakan tahun ketiga kami menyelenggarakan ITCE,

di mana tahun ini kami berencana untuk menyelenggarakan pada bulan September bertempat di Bali,” jelasnya. Ajang ITCE tersebut, diharapkan akan mendatangkan calon pembeli baru yang nantinya bisa transaksi di BKDI dan meningkatkan transaksi timah. Memang tak dipungkiri, BKDI sangat berharap adanya kenaikan transaksi tiap tahunnya. Tapi, kata Stella, hal itu juga sangat bergantung kepada peraturan pemerintah. “Semuanya sesuai dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dan PE (Persetujuan Ekspor) yang ditentukan pemerintah untuk tiap *smelter*,” imbuh Stella Novita Lukman.

Sementara itu, Dirut BKDI, Megain Widjaja, dalam kesempatan yang berbeda, mengatakan, di semester II 2016 berencana merilis kontrak berjangka timah. Hal itu terkait dari tingginya antusias pelaku bertransaksi di pasar fisik timah, maka kontrak berjangka timah akan menjadi acuan harga baik di dalam negeri maupun pasar global.

“Rencana kontrak berjangka timah itu mungkin akan terealisasi di akhir tahun 2016, ini. Karena di semester I, kami pun fokus pada pasar fisik karet,” kata Megain Widjaja.

Negara Tujuan Ekspor Pasar Fisik Timah BKDI 2015

No.	Destination	Total 2015	
		VOL (LOT)	VOL (MT)
1	Singapore	7,926	39,685.73
2	Netherland	1,420	7,107.90
3	Japan	906	4,532.83
4	USA	413	2,066.00
5	Korea	616	3,083.66
6	India	975	4,884.44
7	Taiwan	863	4,326.26
8	Italy	404	2,020.64
9	China	374	1,870.23
10	Spain	35	175.45
11	Malaysia	20	100.08
TOTAL		13,952	69,853.23

Perbandingan harga rata- rata timah 2015:

Tin Price (US\$)/MT		
KLTM	LME	ICDX
16,016	16,070	16,295

Sumber; BKDI



SRG Karet Solusi Bagi Petani

Komoditi karet sebagai salah satu dari 10 jenis komoditi yang dapat disimpan dalam skema SRG, tampaknya mendesak diimplementasikan di tengah harga yang cenderung rendah. Karena tanaman karet senantiasa memproduksi setiap saat dan menjadi sumber pendapatan bagi petani.

Sistem Resi Gudang- SRG Komoditi Karet merupakan salah satu solusi mengangkat harga karet di tingkat petani. Selain menjadi alternatif pembiayaan bagi petani, SRG Karet juga akan mendorong berkembangnya industri hilir di dalam negeri. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai harapan semua pihak, perlu dilakukan pilot *project* SRG Komoditi Karet di sentra-sentra produksi.

Usulan agar pemerintah segera mengimplementasikan SRG Karet itu datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Azam Asman Natawijana, yang menanggapi rencana pengurangan ekspor karet alam atau *agreed export tonnage scheme*- AETS untuk menyiasati turunnya harga komoditas karet alam di tingkat global.

Langkah itu diputuskan tiga negara produsen terbesar karet alam yang tergabung dalam *International Tripartite*

Rubber Council (ITRC) yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dalam dua kali pertemuan di Bangkok, Thailand, pada 19-22 Januari dan 28-29 Januari 2016, lalu.

"Kita sudah memiliki undang-undang tentang SRG, yang dapat membantu para petani khususnya petani karet di saat harga pasar cenderung rendah seperti saat ini. Saya belum melihat ada upaya pemerintah untuk mengintensifkan SRG pada komoditi karet. Karena itu saya mengusulkan kepada pemerintah khususnya Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pembina, untuk menyentuh petani karet," demikian dikatakan Azam Asman Natawijana, politisi Partai Demokrat, ini, dalam sebuah kesempatan 9 Februari 2016, di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Lebih jauh dikatakan Asman, pemerintah harus mengambil jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi

petani karet, karena tanaman karet itu terus berproduksi. Jadi dengan adanya SRG itu, bisa melindungi petani.

"Boleh saja pemerintah bersama negara produsen karet lainnya (Thailand dan Malaysia) melakukan pembatasan ekspor dan berbagai kebijakan penyerapan di dalam negeri, tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan bagi petani," jelas Asman.

Di sisi lain ditegaskan Asman, kalau petani belum mampu menghasilkan komoditi karet sesuai dengan SNI seperti yang dipersyaratkan pada skema SRG, maka Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah pun harus proaktif melakukan pembinaan.

"Jadi menurut saya, kuncinya hanya Resi Gudang untuk membantu petani karet di tengah harga dunia yang sedang jatuh," pungkas Azam Asman Natawijana.

Pilot Project

Kepala Bappebti, Sutriono Edi, juga sependapat dengan usulan Azam Asman Natawijana. Sebab, komoditi karet sudah termasuk salah satu komoditi dari 10 jenis komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG. "Tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai harapan semua pihak, perlu dilakukan pilot projek SRG Komoditi Karet," katanya.

"Komoditi karet memang sudah termasuk dalam 10 jenis komoditi yang dapat di Resi Gudang-kan. Namun hingga sampai saat ini belum ada implementasinya, karena para pelaku karet sendiri pun belum ada yang mau

mencobanya," ujar Sutriono Edi.

Lebih jauh dikatakan Sutriono Edi, pilot *project* itu perlu untuk mengedukasi baik petani maupun pengusaha pengumpul komoditi karet, terutama di sentra produksi. "Karena kalau komoditi karet dimasukan ke gudang SRG harus mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti, gudang dan komoditi karet-nya sesuai SNI," katanya

"Semestinya pemerintah daerah (sentra produksi karet), pengusaha karet atau pun prosesor sudah bisa melakukan SRG Karet. Karena undang-undang SRG itu berlaku universal, yang artinya dapat dilakukan oleh pihak mana pun.

Namun, dalam pelaksanaannya tetap harus berkoordinasi dengan Bappebti sehingga legalitas SRG karet itu diakui untuk dijamin dalam memperoleh pembiayaan," terang Sutriono Edi.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak harga karet di tingkat petani, seperti penyerapan komoditi karet untuk mendukung pembangunan infrastruktur di dalam negeri, tambah Sutriono Edi.

"Namun langkah ini semestinya diikuti dengan implementasi SRG Karet. Karena dengan adanya SRG Karet itu, akan ada kepastian komoditi karet tersedia di dalam negeri," katanya. 

ITRC Batasi Ekspor Karet 615 ribu ton

Tiga negara produsen karet dunia- Indonesia, Thailand dan Malaysia tergabung di *International Tripartite Rubber Council*- ITRC, terus menyiasati penurunan harga karet yang sudah tidak mencerminkan fundamental pasar karet. Dari pertemuan yang dua kali dilakukan di Bangkok, Thailand, pada 19-22 Januari dan 28-29 Januari 2016, lalu, disepakati untuk mengimplementasikan mekanisme pengurangan ekspor karet alam atau *agreed export tonnage scheme*- AETS.

Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, dalam keterangannya mengatakan, rendahnya harga karet alam terutama berdampak pada pendapatan petani. AETS diberlakukan untuk menopang harga agar harga berada pada tingkat yang layak dan remuneratif bagi petani. Besaran pengurangan ekspor yang dilakukan tiga negara adalah 615 ribu ton.

Lebih jauh diutarakan Karyanto, pengurangan ekspor karet itu dilakukan selama enam bulan, terhitung dari 1 Maret hingga 31 Agustus 2016.

"Alokasi pengurangan ekspor dari setiap negara disepakati, yakni Thailand sebanyak 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia sebanyak 52.259 ton," jelas Karyanto.

Menurut Karyanto, perhitungan terbaru dan koreksi data statistik oleh lembaga internasional mengatakan, bahwa pasokan karet alam dunia tahun 2014 dan 2015 sebenarnya sudah lebih rendah dibanding permintaan, sehingga di satu sisi sudah terjadi defisit dan mengurangi besarnya stok global. Namun fenomena penurunan karet itu terus berlangsung.

Selain mengurangi ekspor dan berkurangnya produksi, tambah Karyanto Suprih, pemerintah juga melakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan sisi permintaan. "Yang sedang digarap antara lain kebijakan menyerap produk karet alam untuk kebutuhan industri dan proyek pemerintah di dalam negeri."


"Kita juga sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong inovasi dan meningkatkan penggunaan karet alam produksi dalam negeri, misalnya untuk pembangunan jalan dan *dockfender*," lanjut Karyanto.

Pasar Regional

Untuk mendorong peningkatan harga karet alam, juga ditempuh percepatan pembentukan pasar karet regional. Indonesia, Malaysia, dan Thailand tengah intensif berkoordinasi mengharmonisasikan peraturan dan menyelesaikan persyaratan teknis agar pasar karet regional dapat diluncurkan pada Maret 2016.

"Indonesia prinsipnya siap meluncurkan platform perdagangan elektronik pasar fisik karet, pada bulan Maret 2016, nanti diupayakan bisa kita luncurkan," bilang Karyanto Suprih.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Lainnya, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, Deny Wachyudi Kurnia, mengatakan, negara anggota ITRC juga terus berkomunikasi dengan Vietnam, yang berkomitmen menjadi mitra strategis ITRC, agar ikut serta dalam kesepakatan AETS.

"Pemerintah Vietnam telah berkomitmen dan siap menjadi mitra strategis ITRC. Selama jangka waktu sampai 1 Maret 2016, Indonesia akan berperan serta mengajak Vietnam berpartisipasi dalam mekanisme AETS," terang Deny Wachyudi Kurnia. 



Kepala Bappebti Tinjau Rice Milling Unit Gudang SRG Cianjur

Kepala Bappebti, Sutriono Edi dan Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Tris Sudarto meninjau *Rice Milling Unit* (RMU) yang baru terpasang di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Koperasi Niaga Mukti, di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Selain meninjau gudang SRG, Kepala Bappebti juga berdiskusi dengan jajaran Pemda Kabupaten Cianjur untuk mengoptimalkan SRG. Antara lain yaitu dengan mengintegrasikan SRG dengan Pasar Lelang secara online.

Sekedar informasi, pada tahun 2015, gudang SRG Niaga Mukti Cianjur yang memiliki luas 3.000 meter, mampu menampung hasil panen sebanyak 1.600 ton gabah.



Rakor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BI Percepatan Sistem Logistik untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Kepala Bappebti Sutriono Edi mewakili Menteri Perdagangan RI mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat dan daerah untuk membahas perbaikan sistem logistik dan ketahanan pangan di Kupang, Jum'at (12/02).

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan diikuti oleh anggota Dewan Gubernur BI, Pejabat Tinggi Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan. Sementara itu dari Pemerintah Daerah hadir Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTB, Wakil Gubernur Bali serta Pejabat Pemerintah Kab./Kota di Prov NTT.



Satgas Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi Bappebti Kemendag, Veri Anggriono mewakili Kepala Biro Hukum Bappebti menghadiri rapat Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi yang diselenggarakan di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Kamis (18/02)

Rapat dihadiri antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UKM, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.



Pelatihan PBK dan Koordinasi Terhadap Reserse POLRI

Bappebti memberikan asistensi hukum kepada Peserta Dikbangspes Bintara Idik Tindak Pidana Perbankan Tahun 2016 yang menjalankan fungsi Reserse Polri di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Pusdik Reskrim Megamendung.

Tim Bappebti memberikan pemahaman kepada para reserse yang mencakup materi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Berjangka, termasuk kelembagaan dan Business Process Industri Perdagangan Berjangka, serta beberapa modus dan kasus di bidang Perdagangan Berjangka, khususnya modus perusahaan ilegal yang berkedok PBK.



Pialang Berjangka Wajib Sediakan Layanan SITNa

Sistem Informasi Transaksi Nasabah- SITNa sejak diluncurkan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) bersama Jakarta Futures Exchange- JFX pada 10 November 2015, hingga saat ini telah dapat diakses ke sebanyak 2.200 akun milik nasabah. Akun milik nasabah itu, berasal dari sebanyak 15 perusahaan pialang berjangka anggota JFX dan KBI.

Perusahaan pialang berjangka dan pedagang berjangka wajib menyediakan fasilitas SITNa seiring dengan disetujuinya perubahan PTT- Peraturan Tata Tertib KBI. Demikian antara lain dikatakan Dirut KBI, Tris Sudarto, kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

"Hingga saat ini ada sebanyak 48 perusahaan pialang berjangka yang menjadi anggota JFX dan KBI. Namun dari sebanyak 48 perusahaan pialang berjangka itu baru ada sebanyak 15 perusahaan yang sudah memfasilitasi nasabahnya dengan SITNa," katanya.

Seperti diketahui, SITNa merupakan sebuah sistem aplikasi yang disediakan KBI dengan JFX untuk memfasilitasi nasabah dalam mendeteksi secara real time transaksi perdagangan berjangka yang diamanatkan ke perusahaan pialang berjangka.


Lebih jauh dikatakan Tris Sudarto, fasilitas SITNa itu merupakan layanan yang membuat perusahaan pialang berjangka kredibel di mata nasabahnya. "Karena dengan fasilitas SITNa, nasabah setiap saat dapat mengetahui posisi transaksinya."

"Pada akhir tahun 2015, lalu, Bappebti telah menyetujui



perubahan Peraturan Tata Tertib- PTT PT Kliring Berjangka Indonesia. Itu artinya, setiap anggota KBI maupun JFX berkewajiban menyediakan fasilitas SITNa untuk dapat diakses nasabah pialang berjangka," tegas Tris Sudarto.

Menurut Tris Sudarto, "PTT itu adalah 'aturan main' yang harus diikuti setiap anggota. Sehingga ketika ada anggota yang tidak mematuhi pasti akan dikenakan sanksi."

"Tetapi kami masih memberi waktu kepada anggota hingga semester pertama 2016, ini. Karena memang untuk menyediakan layanan itu, dari sisi perusahaan pialang harus mempersiapkan data-data yang dibutuhkan pada aplikasi SITNa," pungkash Tris Sudarto. 

Kompetensi WPB Bakal Terdaftar di BNSP

Standardisasi dan syarat profesi Wakil Pialang Berjangka- WPB yang merupakan garda terdepan industri perdagangan berjangka komoditi dalam waktu dekat akan didaftarkan Bappebti ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi- BNSP. Dengan begitu, setiap pihak baik warga negara Indonesia maupun warga asing yang berminat menjadi WPB di pialang berjangka wajib memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada di BNSP.


"Dengan adanya standardisasi WPB yang berlaku secara universal, SDM kita pun akan mendapat pengakuan secara internasional. Dan WPB kita pun, dapat bekerja di industri sejenis di luar negeri," ujar Kepala Bappebti, Sutiriono Edi, kepada media di sela-sela pertemuan tahunan pelaku perdagangan berjangka komoditi, 20 Januari 2016, di Jakarta.

Namun dikatakan Sutiriono Edi, saat ini tolak ukur kompetensi WPB masih dalam penggodokan di Bappebti. "Kita harapkan tahun ini sudah bisa dirampungkan dan dapat didaftarkan di

BNSP. Sehingga jika ada warga asing yang berminat menjadi WPB di Indonesia sudah memiliki tolak ukur," katanya.

"Sesuai dengan karakternya, industri perdagangan berjangka komoditi ini merupakan industri yang terbuka bagi siapa pun. Jadi tidak ada alasan untuk membatasi seseorang untuk memasuki industri ini. Karena itulah kita perlukan kompetensi WPB," ujar Sutiriono Edi.

Di sisi lain juga dikatakan, kami juga telah mempersiapkan pegawai Bappebti agar punya keahlian dengan standar internasional. "Karenanya pegawai Bappebti akan mengikuti pelatihan dan mendapatkan *Certified Information Systems Auditor- CISA*," jelasnya.

"Kami pun mendorong pelaku bursa untuk ikut aktif bekerjasama dengan bursa berjangka dari negara lain anggota Asean seperti Singapura dan Malaysia. Dengan demikian produk bursa berjangka Indonesia bisa ditransaksikan di luar negeri, begitu juga sebaliknya," imbuh Sutiriono Edi. 

Bikin Petani Pintar, Bappebti Siap Luncurkan SRG Mobile

Bappebti bersiap meluncurkan Sistem Resi Gudang- SRG Mobile sebagai upaya menjawab tantangan perdagangan di era digital. Dengan aplikasi mobile itu diharapkan masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan SRG yang terintegrasi dengan Pasar Lelang Komoditas- PLK. Aplikasi perdagangan komoditi itu rencananya akan diluncurkan pada pertengahan 2016.

"Tujuan diluncurkannya aplikasi SRG Mobile itu untuk memberikan kemudahan bagi petani dan produsen dalam hal registrasi menjadi anggota SRG, melakukan transaksi Resi Gudang, mengakses informasi harga harian komoditi, dan jadwal pelaksanaan pasar lelang komoditi," jelas Kepala Bappebti, Sutiriono Edi, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Di samping itu, tambahnya, dengan SRG Mobile para petani dapat melakukan simulasi penghitungan biaya serta mengajukan penyimpanan komoditi di gudang SRG dan pembiayaan di bank.


"Karena itu dalam waktu dekat kami pun akan melakukan edukasi tentang cara penggunaannya kepada para petani, poktan, UKM, koperasi, BUMN/BUMD, dan akademisi di berbagai daerah di Indonesia."

"Sekarang ini sudah zaman online. Tukang ojek saja sudah

menggunakan *smartphone*, dan teknologi itu memudahkan pengguna jasa ojek. Jadi dengan SRG Mobile ini pun kita akan memfasilitasi para petani untuk berbisnis yang lebih modern," ujar Sutiriono.

Menurut Sutiriono Edi, SRG merupakan instrumen yang mereposisi kembali komoditas pertanian sebagai barang yang bernilai ekonomis dan layak digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank.

"Sedangkan pasar lelang komoditi dapat menjadi sarana pemasaran bagi komoditas yang disimpan dalam gudang SRG. Sebaliknya, komoditas yang disimpan di gudang SRG dapat dijadikan sarana penyelesaian fisik (penyerahan komoditas) atas aktivitas jual beli di pasar lelang."

"Integrasi SRG dan PLK dari hulu sampai hilir akan mendekatkan pelaku usaha, khususnya petani dan UKM, kepada pasar. Integrasi ini pun akan memberikan manfaat besar kepada para pelaku komoditi karena menciptakan efisiensi perdagangan dan peningkatan daya saing, tersedianya referensi harga komoditas bagi pelaku usaha, solusi pembiayaan mudah dan murah, serta memberi peluang bisnis baru bagi pelaku usaha," terang Sutiriono Edi. 

BKDI Serius Garap Pasar Karet dan Kontrak Berjangka Timah

Mendongkrak kinerja di tengah berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI akan berfokus pada dua kontrak baru di tahun 2016, ini. Di semester pertama BKDI akan fokus pada pembentukan dewan karet yang terintegrasi dengan Malaysia dan Thailand.

Demikian antara lain dikatakan Dirut BKDI, Megain Widjaja, dalam sebuah kesempatan pertemuan pelaku perdagangan berjangka komoditi di Jakarta, 20 Januari 2016.


"Nantinya pada pertengahan Juni 2016 diharapkan dewan tersebut sudah resmi berjalan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga karet dan menciptakan harga yang lebih *fair* di pasar," katanya.

Dalam penjelasannya, Megain Widjaja, mengatakan, tahun 2011 harga karet masih berkisar US\$ 4,8 per kg. Namun di tahun 2016 ini sudah terpuruk ke level US\$ 1 per kg. "Bagaimana mungkin petani karet kita mampu bertahan dengan pergerakan

harga seperti itu? Jadi harus ada langkah untuk membenahi struktur pasar karet di negara-negara produsen karet," ujar Megain.

Dengan potensi karet Indonesia yang besar, BKDI merasa perlu menciptakan kekuatan regional yang bisa memberikan referensi patokan harga yang wajar. Maka MEA bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk saling menggandeng dengan kekuatan Asia lainnya.

Fokus BKDI yang kedua adalah merilis kontrak berjangka timah. Berkaca dari tingginya antusias pelaku bertransaksi di pasar fisik timah, maka kontrak berjangka timah akan menjadi acuan harga baik di dalam negeri maupun pasar global.

"Rencana kontrak berjangka timah itu mungkin akan terealisasi di akhir tahun, setelah urusan karet selesai dan berjalan," pungkash Megain Widjaja. 




FAO: Harga Pangan Merosot 1,9 %

Food and Agriculture Organization- FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berbasis di Roma, Italia, baru-baru ini mengungkapkan, harga pangan dunia di awal 2016 sama seperti akhir tahun lalu, yaitu merosot 1,9 % ketingkat terendah dalam kurun waktu tujuh tahun.

Pendorong utama dalam indeks itu, yakni, harga komoditas gula yang turun 4,1% dibandingkan dengan Desember 2015. Harga biji-bijian dan sereal turun 1,7 % dibandingkan bulan sebelumnya, hal ini didorong oleh meningkatnya persaingan di pasar-pasar gandum dan jagung. Sedangkan harga beras cenderung datar dibandingkan dengan Desember 2015. Sementara itu, harga minyak dan lemak juga turun 1,7 % dan harga daging 1,1 % lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Dengan angka terbaru itu, harga pangan secara keseluruhan telah jatuh 19 kali dalam 22 bulan sebelumnya. Harga-harga 16 % lebih rendah dari pada bulan yang sama pada 2015. Terakhir kali indeks FAO pada tingkat rendah terjadi pada April 2009.

Indeks FAO berikutnya yang akan disurvei pada kelompok 55 barang dan 73 kutipan harga dari lima kelompok komoditas pangan utama, akan dirilis pada 3 Maret 2015. 


Program Biodiesel Bakal Dongkrak Harga CPO

Pemerintah telah menetapkan kewajiban penggunaan atau mandatori 20 % biodiesel dengan minyak kelapa sawit (B20). Dengan program itu, akan lebih banyak lagi penyerapan CPO (*crude palm oil*) di dalam negeri, sehingga harga komoditi ini akan stabil, bahkan mengalami kenaikan.

Direktur Utama Badan Layanan Umum CPO Fund, Bayu Khrisnamurti, mengungkapkan, Pertamina telah membeli 230.000 kilo liter biodiesel pada bulan Januari lalu. Angka tersebut naik signifikan dari 87.000 kiloliter pada periode sama tahun lalu.

Para analisis pasar CPO baik dari dalam negeri ataupun dari negara jiran, juga meyakini harga CPO akan terus mendapat dorongan dari sentimen positif program biodiesel pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini juga mengatakan, kontribusi kelapa sawit bagi pengembangan bio energi cukup signifikan. Permintaan pada sawit minyak masih akan bertambah sampai 2020, meningkat lebih dari 80 juta matrik ton yang nantinya 35% sumbang dari pasokan minyak sayur dunia.

"Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia, pertumbuhan minyak sawit ini masih akan mampu tumbuh di atas 8,5 % per tahun yang akan berlanjut setelah 2020. Indonesia akan jadi produsen terbesar 88 % dari pasokan dunia," ungkap Darmin Nasution. 

Genjot Produksi Kakao, Kementan Perlu Rp 20 triliun

Indonesia tercatat memiliki lahan 1,7 juta hektar tanaman kakao. Luas ini setara dengan luas lahan milik negara produsen kakao terbesar di dunia yakni Pantai Gading. Namun demikian, produksi kakao Indonesia berada di posisi ketiga produsen terbesar kakao dunia setelah Ghana di posisi kedua.


Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pihaknya menargetkan bisa menyalap Ghana di urutan kedua dalam 3-5 tahun ke depan. Caranya, dengan melakukan peremajaan- *replanting* dan peningkatan produktivitas kebun kakao.

"Lahan kakao kita sama dengan Pantai Gading, hanya masalah produktivitas saja. Di mana dari 1,7 juta hektar, 400 ribu hektar merupakan tanaman tua, dan 400 ribu lagi merupakan TBM- Tanaman Belum Menghasilkan. Kalau itu digabung dalam 3-5 tahun kita sudah nomor dua di dunia," kata Amran dalam sebuah kesempatan di Komiditi IV DPR-RI, baru-baru ini.

Kendati demikian, lanjut Amran, untuk peningkatan produktivitas kakao tersebut, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 20 triliun. Dana tersebut sudah mencakup peremajaan hingga peningkatan produktivitas kebun kakao yang masih berproduksi.

Kementan sendiri saat ini tengah membahas alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Bank BRI agar setidaknya mengucurkan Rp 5-10 triliun untuk petani kakao.

"Anggarannya sampai Rp 20 triliun, kita sedang ngomong ke BRI kalau bisa Rp 5-10 triliun," ujarnya.

Saat ini, dengan luas lahan kakao 1,7 juta hektar, tingkat produktivitas kakao petani di Indonesia hanya mampu menghasilkan rata-rata 0,5 ton per hektar. Sementara produksi nasional hanya bisa mencapai 700.000-800.000 ton per tahunnya. 

FBR Must have Class Competence AEC


With the coming Asean Economic Community in 2016, Coftra as commodity futures trading authority has released standarization policy for Futures Broker Representation- FBR therefore not all foreigners can be a representative at Indonesian commodity futures trading.

"Besides that, we also prepare Coftra's staff for having international standard skill. Therefore Coftra's staff will join training and will get Certified Information Systems Auditor – CISA," Sutriono Edi, Coftra's chief explained to the press on last December 2015.

Moreover Sutriono Edi said that exchange players will be encouraged to be actively work with overseas exchange from Asean's member such as Singapore and Malaysia. Therefore Indonesian futures exchange product can be transacted overseas and vise versa.

From Sutriono Edi's point of view, the trend of commodity

price derivation at international market that has been occurred on the couple last years is not directly related with commodity exchange trading business. " Just in time of commodity price derivation, futures exchange role is very important because the commodity players can manage the risk by doing hedging," he said.

For example, from the database coffee futures contract at Jakarta Futures Exchange – JFX on October 2015 period has increased 71%. It also happened with cocoa commodity that has increased 67%. The increase of JFX transaction volume has shown that commodity players has taken hedging position," Sutriono Edi said. 

Rattan Warehouse Receipt System now is available in Indonesia

Government through Coftra - Ministry of Trade has officially announced the first Rattan warehouse receipt system in Indonesia, 22nd of December 2015. The warehouse location is at Rattan Hampangen industrial area, Katingan District, Central Kalimantan. As the biggest rattan producer in Kalimantan, this district is expected for optimize upstream and downstream integration, between farmers and industrial demand.


Ministry of Trade expert staff on Management section, Djunaedi, has emphasized that rattan stock in Katingan is overloaded. Rattan price has continually decreased due to the closure of raw rattan export chance. In the same time, farmers/ rattan picker needs working capital.

"The policy for having rattan as one of commodities that is stored in warehouse system receipt warehouse is to bridge the need of rattan farmers/pickers with rattan industrial community," Djunaedi said on behalf of Coftra's Chief Sutriono Edi while inaugurating the warehouse for rattan commodity.

The rattan production that has been produced at production

centre region can be easily absorbed and quality guaranteed by the industry. The stock availability of rattan that fulfill rattan industry demand can be the major asset for the growth of competitive domestic rattan industry.

"Warehouse Receipt system is the system for trading and funding that can support the effort to increase trading competitiveness and expand the access of working capital increase for farmers, *UKM*, and also other business players, including players for rattan commodity," Djunaedi emphasized.

He revealed that rattan contribution is quite big as one of country foreign exchange producers. Indonesia is well known as exporter country for rattan handmade product and as the biggest rattan raw material supplier country. Every year Indonesia contributes 80 % of world rattan demand and 90 % of it was taken from tropical forest in Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi and the rest was taken from rattan cultivation. 



Fitriyani; 08538070xxxx

Mahasiswa IPB

Tanya;

Yth. Bappebti, saya tertarik dan menaruh minat untuk mendalami mekanisme Pasar Lelang Komoditi dan juga Sistem Resi Gudang (SRG). Terkait itu, saya mohon diberi informasi alamat pasar lelang Bandung dan gudang SRG Cianjur, Jabar.

Jawaban:

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Pasar Lelang Komoditi Jawa Barat dan Sistem Resi Gudang Cianjur, Anda dapat menghubungi alamat berikut ini;

Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat
Jl. Sampurna 18, Bandung, Jawa Barat

Gudang SRG Kab. Cianjur
Jl. Raya Cianjur Sukabumi Km 8 Kp. Cijoho RT 01/14
Desa Jambudipa Kec. Warung Kondang Kab. Cianjur, Jawa Barat
Terima kasih.

Abd. Syahril; 08134585xxx

Tanya;

Singkat cerita, saudara saya di Pekanbaru, Riau, menghadapi masalah dengan salah satu perusahaan pialang. Namun, permasalahan itu tak kunjung tuntas sejak tahun 2014, lalu. Pertanyaan saya, bagaimana cara penyelesaiannya?

Jawaban:

Sebelum Anda melangkah lebih jauh, pastikan dulu apakah perusahaan pialang tersebut memiliki izin resmi dari Bappebti dan menjadi anggota bursa berjangka. Jika hal itu sudah dilakukan, Anda dapat menghubungi bursa berjangka bersangkutan dan berkonsultasi dengan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Closing Price

Price of the last trade on an particular day for specific security.

2. Closing Price

See Settlement Price.

3. Closing Purchase

A purchase of an option to eliminate or reduce a short options position.

4. Closing Range

A range of prices at which buy and sell transactions took place during the market close.

5. Closing-Out

Liquidating an existing long or short futures or option position with an equal and opposite transaction. Also known as Offset.

6. Coincident Indicator

An economic indicator that reflects changes in the economy. The index of industrial production and retail sales are both coincident indicators.

7. Collar

A contract between a borrower and a lender whereby the borrower will not have to pay more than some maximum interest rate on the borrowed funds, and whereby the lender is assured of receiving some minimum interest rate on the funds lent.

8. Collateral

A general term used in the market for the value of any borrowed funds.

9. Combination

Puts and calls held either long or short with different strike prices and expirations.

10. Commercial

An entity involved in the production, processing, or merchandising of a commodity.

REKAPITULASI RESI GUDANG TAHUNAN

TAHUN	PENERBITAN						PEMBIAYAAN				
	Resi Gudang		Komoditi								
	Jumlah	% *)	Volume (ton)	% *)	Nilai Barang	% *)	Jumlah RG	% *)	Nilai	% *)	Lembaga Keuangan
2008	16		508,83		Rp1.431.616.200		6		Rp313.900.000		BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim
2009	13	-19%	214,11	-58%	Rp552.962.240	-61%	5	83%	Rp136.800.000	44%	BRI
2010	57	338%	2.299,94	974%	Rp8.678.733.500	1469%	35	600%	Rp4.216.023.850	2982%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
2011	271	375%	8.895,62	287%	Rp40.067.723.608	362%	218	523%	Rp24.049.719.530	470%	LPDB, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, BRI
2012	379	40%	18.144,16	104%	Rp93.183.187.979	133%	334	53%	Rp58.653.918.633	144%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI, Bank Jateng
2013	532	40%	20.796,23	15%	Rp108.948.556.100	17%	446	34%	Rp66.993.206.000	14%	BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB, PKBL KBI
2014	605	14%	21.649,27	4%	Rp116.514.391.200	7%	559	25%	Rp75.795.102.000	13%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI
2015	300	-50%	8.931,92	-59%	Rp81.171.788.490	-30%	207	-63%	Rp45.562.784.680	-40%	Bank BJB, BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Lampung, PKBL KBI
TOTAL	2173		81.440,08		Rp450.548.959.317		1810		Rp275.721.454.693		

*) Prosentase pertumbuhan pada bulan berjalan tahun sebelumnya

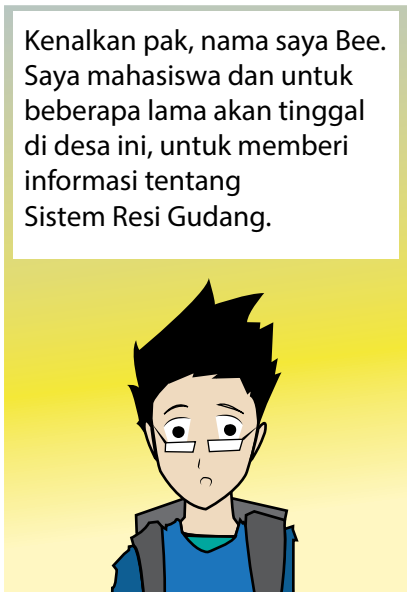
**) Sampai dengan laporan ini dibuat

BAPPEBTI

Ketika Mahasiswa Jadi ‘Duta SRG’



Pak Tono : Wah, tentu tidak ‘nak. Bapak justru senang, karena anak kan dari kota dan mau berkunjung ke desa Bapak ini.
Mr. Bee : Panen gabah ini sudah berlama pak? Dan sepertinya lumayan banyak.
Pak Tono : Sudah sekitar 2 minggu, ‘nak. Gabah yang ini sekitar 20 kwintal, dan di rumah masih ada lagi sekitar 60 kwintal lagi. Tapi, ya, begini ‘lah, ‘nak, mataharinya kurang panas. Terkadang baru 1 jam sudah dijemur, harus dirapikan lagi karena hujan mau turun. Jadi Bapak harus menjemur terus.
Mr. Bee : Wah, jadi repot dan capek ya ‘pak.
Pak Tono : Begitulah ‘nak nasib petani. Kalau harga gabahnya lumayan tinggi, masih bagus. Tapi yang sering terjadi, harganya tak pas dan tak cukup untuk modal nanam lagi.
Mr. Bee : ‘Nah, sepertinya kedatangan saya ini pas. Jadi saya bisa sedikit ceritakan apa maksud dan tujuan pemerintah membangun gudang SRG. Pertama, yang pasti membantu petani. Kalau tadi Bapak kewalahan menjemur gabah, di gudang SRG ada mesin pengering. Sebab dengan mesin pegering itu, mutu gabah bisa terjaga sesuai SNI. Mutu gabah yang terbaik itu kadar airnya 14 % ‘pak. Maka harga jualnya pun tinggi.
Pak Tono : Oh, begitu ya ‘nak??? Terus tujuan lainnya apa ‘nak?
Mr. Bee : Kalau kadar air gabah sudah mencapai 14 %, Bapak bisa menyimpan gabah di gudang SRG. Dan ketika Bapak menyimpan gabah, Bapak akan diberi Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan gabah.
Pak Tono : Resi Gudang itu untuk apa ‘nak?
Mr. Bee : Selain sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang bisa dijaminkan ke bank untuk memperoleh pembiayaan dan bunganya disubsidi pemerintah. Hanya 6 %. Sehingga kalau ada keperluan mendesak atau untuk modal menanam lagi, Bapak tidak perlu repot lagi mencari uang.
Pak Tono : Terus, bagaimana nantinya membayar pinjaman itu???
Mr. Bee : Biasanya harga gabah akan bagus sekitar 1 atau 2 bulan setelah panen raya. Ketika harga bagus itu Bapak bisa menjual gabah yang da di gudang SRG, dari penjualan itulah Bapak melunasi pinjaman bank yang tadi.
Pak Tono : Wah,,,,!!! Saat ini juga Bapak harus bawa gabah Bapak ke gudang SRG itu. Terimakasih ya ‘nak, penjelasannya.





Potensi Komoditi Timah Sebagai Subjek SRG

Perdagangan timah Indonesia di pasar timah internasional dinilai potensial. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan produksi dan permintaan timah di tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2012. Berdasarkan laporan tahunan PT. Timah Tbk, 2014, menyatakan bahwa *International Tin Research Institute* (ITRI) memprakirakan produksi dan pasokan logam timah ke pasar dunia di tahun 2014 sedikit meningkat dari tahun 2013, yakni sekitar 356,7 ribu ton, naik 4,7 % dari 340,8 ribu ton. Sementara permintaan mengalami kenaikan sebesar 1,6 %, dari 348,7 ribu ton menjadi 354,3 ribu ton di 2014.

Kenaikan permintaan itu dikarenakan produsen barang elektronik di Tiongkok, yang kendati pertumbuhannya

melambat, tetap menghasilkan produk-produk kompetitif dari segi harga bagi konsumen di seluruh dunia. Meningkatnya produksi di tengah stagnannya konsumsi menyebabkan kenaikan neraca persediaan timah dunia sebesar 2.400 ton.

Dengan diberlakukannya Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang Ketentuan Ekspor Timah yang mengharuskan logam timah dijual ke luar negeri hanya melalui satu pintu yaitu BKDI, mengharuskan industri-industri timah di Indonesia merumuskan ulang strategi pemasarannya. Sebelumnya dari awal tahun 2013 hingga Agustus 2013, industri-industri timah lebih banyak menjual produk timahnya secara langsung ke para pelanggannya berdasarkan kontrak dan sisanya dijual di pasar global secara

spot. Terhitung 30 Agustus 2013, seluruh produk logam timah yang diekspor dijual melalui BKDI dengan harga *spot*.

SRG Timah

Sistem Resi Gudang- SRG dapat meningkatkan akses kredit pengusaha karena SRG memudahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman/ pembiayaan dari bank dengan menyimpan komoditi mereka di gudang yang dapat digunakan sebagai agunan. Selain itu dengan SRG pengusaha mudah untuk menjual hasil produk mereka, tidak perlu membawa fisik barang, cukup dengan membawa resi gudang.

SRG juga membuat pengusaha mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan mereka harus menjual hasil produksinya pada saat harga turun,

lebih baik mereka menyimpan barangnya di gudang dan mendapatkan pinjaman (uang) dari bank sambil menunggu harga yang lebih baik.

Implikasi turunan dari sebuah kebijakan pusat dan kemudian diimplementasikan untuk kepentingan daerah seperti yang tertuang dalam penerapan SRG adalah penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Muara dari pemanfaatan SRG oleh dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan sehingga daya saing dan pendapatan pengusaha dapat meningkat serta kesejahteraan pengusaha dapat terwujud dan manfaat turunannya adalah penerimaan asli daerah dapat diciptakan.

Dari uraian ini, maka SRG dapat

- dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia usaha komoditi timah, atau dengan kata lain komoditi timah layak sebagai subyek SRG. Berikut ini pertimbangannya;
1. Permintaan dunia akan timah terus meningkat akan tetapi persediaan timah di LME terus menurun sehingga Indonesia mempunyai peluang untuk memenuhi permintaan dan meningkatkan persediaan timah internasional. Di samping itu harga timah internasional cenderung meningkat selama periode Februari 2014 – Maret 2014, hal ini sangat menguntungkan Indonesia jika dapat memasok timah ke pasar internasional secara berkelanjutan.
 2. Dana segar dapat diperoleh oleh pelaku pasar dengan jaminan kredit melalui penerapan SRG untuk keberlangsungan proses secara berkelanjutan.
 3. Modal kerja eksplorasi timah dapat diperoleh melalui penerapan SRG sehingga dapat menjamin keberlanjutan pengolahan bahan baku.
 4. Untuk dapat membangun industri-industri tersebut melalui pengembangan usaha diperlukan investasi yang cukup besar yang dapat dicarikan melalui penerapan SRG pada komoditi timah yang sudah diproduksi oleh industri tersebut.

Analisis kelayakan komoditi timah sebagai subyek SRG telah dikaji melalui *Desk Research* dan hasil FGD di Pangkal Pinang, Bangka, pada tanggal 10 Juni 2014, lalu, dengan memperhatikan Tabel SWOT di bawah ini. Sepuluh *item* kekuatan industri timah dapat membuka beberapa peluang (8 *item*) dan terdapat beberapa hambatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Hambatan-hambatan yang timbul dari analisis SWOT menjadikan bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi apakah komoditi timah layak sebagai subyek SRG.

KEKUATAN (STRENGTH)	TANTANGAN (WEAKNESS)
<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi pertambangan timah.• Sumber daya dan cadangan meluas• Merek dagang yang telah dikenal luas.• Jaringan pemasaran yang ekstensif.• Kebijakan pemerintah yang mendukung.• Indonesia penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Cina.• Indonesia pengekspor timah terbesar di dunia dengan mengekspor 98% produk timah.• Indonesia menguasai 1/3 rata-rata konsumsi timah dunia.• Pergerakan harga timah di LME mengikuti harga timah BKDI.• Layak di simpan di gudang dalam jangka waktu lama karena tahan korosi dan mudah perawatannya (tidak memerlukan teknologi penyimpanan).	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM).• Pengembangan teknologi proses.• Pendirian industri hilir timah dan diversifikasinya yang belum ada di Indonesia.• Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan internasional dan domestik yang terus meningkat.
PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan wilayah penambangan legal.• Peningkatan produksi konsentrat timah dengan kadar 74% Sn.• Peningkatan nilai ekspor.• Peningkatan jaringan ekspor.• Terbentuk tata niaga logam yang legal.• Peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan timah internasional.• Kenaikan harga timah.• Dapat dijadikan Subyek Sistem Resi Gudang (SRG).	<ul style="list-style-type: none">• Diperlukan dana untuk pelatihan keterampilan dan profesionalisme SDM.• Rendahnya <i>skill</i> SDM dan jaminan modal untuk pengembangan teknologi proses.• Tidak adanya akses jaminan kredit untuk modal pendirian industri hilir timah.• Praktek penambangan / pengumpulan bijih timah ilegal.• Tumpang tindih penggunaan lahan.• Fluktuasi harga timah akibat aktivitas <i>trader</i>.• Reklamasi lahan pasca tambang yang rawan gangguan.



Kisah Sukses Sang Pengelola SRG Batola

Karlian Cilan

Gerakan Koperasi telah mendarah daging dan menjadi nafas kehidupan bagi Karlian Cilan. Dialah salah satu sosok di balik kisah sukses SRG Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Karlian bertekad akan menjadikan gudang SRG di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat maju dan terus berkembang. Lokasinya cukup strategis. Keberadaan Gudang SRG ini juga sangat tepat karena berada di daerah yang menjadi lumbung padi terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Persisnya, gudang ini terletak di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.

Gudang SRG Batola telah beroperasi sejak akhir 2010 lalu. Dalam perjalanannya, gudang ini dinilai cukup berhasil mengimplementasikan skema SRG. Keberhasilan itu tak terlepas dari peran KUD Tuntung Pandang yang dipercaya menjadi Pengelola Gudang sejak 4 April 2014 lalu.

Jika bicara KUD Tuntung Pandang, maka nama Karlian tentu tak bisa dipisahkan. Sebab, pria kelahiran

Mengkatip, 13 April 1962, ini, telah dipercaya menjadi Ketua KUD Tuntung Pandang sejak 2004 silam. Otomatis, di tahun 2014, dia juga dipercaya menjadi Kepala Resi Gudang SRG Batola.

"Gudang SRG Batola berkembang dengan baik," kata Karlian kepada **Buletin Bappebti**, belum lama ini. Dia juga bilang, implementasi gudang SRG Batola sudah dianggap berhasil oleh Bappebti. Gudang SRG ini juga mampu bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah-BPD yang memberi pembiayaan atas Resi Gudang petani.

Meski begitu, Karlian mengakui, belum semua kelompok tani menyimpan gabahnya di gudang SRG Batola. Tercatat, hingga saat ini baru sekitar 29 kelompok tani yang sudah memanfaatkan SRG. Karenanya, masih diperlukan sosialisasi tentang manfaat SRG bagi petani.

"Kami harus lebih giat lagi memberikan

motivasi kepada petani agar mereka mau menyimpan gabahnya di gudang SRG. Itu tantangan kami sebagai pengelola gudang," ucapnya.

Selain itu, ayah dari empat orang anak ini, bilang, Pengelola Gudang juga harus memiliki jiwa kewirausahaan. Karena selain mendapatkan keuntungan dari jasa pelayanan yang diberikan, maka pengelola gudang juga harus mengambil langkah lain yang berbasis bisnis. Satu contoh yaitu, memasarkan komoditi gabah yang ada di gudang SRG.

Untuk itu, di tahun 2016, pria lulusan Sarjana Administrasi Negara, ini, membeberkan, pihaknya memiliki program untuk menjadi *buyer* (pembeli) tetap gabah petani yang disimpan di gudang SRG. Lalu, dia juga ingin mengolah gabah tersebut menjadi beras agar memiliki nilai tambah ketika dijual.

Malaikat Penyelamat

Gudang SRG Batola dibangun pada tahun 2009 dengan kapasitas simpan hingga 1.200 ton gabah kering giling. Kehadiran gudang ini, menurut Karlian bak malaikat penyelamat bagi para petani setempat.

Pasalnya, petani memiliki alternatif pembiayaan untuk aktivitas pertaniannya dari resi yang diterimanya ketika menyimpan komoditas di gudang. "Sebelum ada SRG tidak pernah ada pembiayaan dari bank. Jadi ini sangat membantu sekali kepada para petani," ucapnya.

Selain itu, dahulu, petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Dia bilang, harga gabah ditentukan oleh tengkulak dan petani tidak punya daya tawar. "Akhirnya petani pun menjual gabahnya seharga yang ditawarkan oleh para tengkulak."

"Berbeda dengan kondisi setelah adanya gudang SRG. Saat ini petani sudah mempunyai daya tawar yang cukup tinggi sehingga tidak menjual gabahnya sewaktu panen raya. Apabila harga tidak sesuai dengan kehendak petani, maka sebagian petani memasukan gabahnya ke gudang SRG," tutur Karlian.

Di samping itu, suami dari Budimah ini juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah kepada gudang SRG Batola. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batola telah memberikan perhatian yang cukup baik. Di antaranya, memberikan bantuan pembiayaan untuk operasional pengelolaan gudang SRG; pengaspalan halaman gudang kantor SRG; pengadaan Falet; pembuatan rumah jaga; pembuatan drainase; pemasangan antena internet; CCTV; serta perlengkapan alat kantor.

Hanya saja, dia menambahkan, meski sarana prasarana gudang SRG sudah mencukupi, masih ada keterbatasan yang dihadapinya. "Kami masih memerlukan tambahan *forklift* untuk menyusun gabah," ungkap Karlian.

Memajukan Koperasi

Adalah sangat tepat jika KUD Tuntung Pandang dipercaya mengatur Pengelola Gudang SRG Batola. Koperasi ini banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan koperasi lainnya. Bahkan, Karlian mengatakan, KUD Tuntung Pandang pernah menjadi koperasi terbaik se-Kalimantan Selatan.

Koperasi ini merupakan satu-satunya KUD di wilayah Kecamatan Mandastana. Wilayah kerja dan keanggotaannya meliputi 14 desa. Hingga saat ini, jumlah anggotanya telah mencapai 1.521 orang.

Jika bicara mengenai KUD Tuntung Pandang, perjalanan Karlian bersama koperasi ini memang cukup panjang. Awalnya dia dipercaya menjadi seorang pengawas koperasi tersebut pada tahun 2003. Tak berselang lama, dia diangkat menjadi seorang pengurus dan menjabat sebagai sekretaris.

Barulah, di tahun 2004 dia ditetapkan sebagai Ketua KUD Tuntung Pandang. Dan jabatan itu telah dilakoni hingga sekarang. "Saya ingin menjadikan koperasi lebih maju, berkualitas dan berdaya saing. Itu salah satu motivasi saya bergabung dengan KUD Tuntung Pandang," ujar pria yang memiliki motto hidup berguna untuk orang lain, ini.


Meski tidak dapat dikatakan sebagai pendiri KUD Tuntung Pandang, Karlian dengan gamblang menceritakan cikal bakal terbentuknya koperasi tersebut. Menurutnya, pada tahun 1972 didirikan lumbung paceklik terdiri dari 75 orang anggota. Tujuannya, memberikan pinjaman kepada anggota untuk menanggulangi musim paceklik. "Sampai tahun 1975 telah terkumpul sebanyak 500 blek (5 ton) gabah."

Selanjutnya, atas keinginan anggotanya dibentuklah koperasi yang beranggotakan 50 orang. "Saat itu namanya Koperasi Pertanian Sri Rejeki yang berdomisili di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana," kata pria yang hobi badminton ini. Di kecamatan yang



sama, tepatnya di Desa Puntik Luar ternyata telah berdiri juga KUD Tuntung Pandang.

Namun, Inpres No. 2 Tahun 1978, menetapkan, dalam satu kecamatan hanya boleh ada satu KUD. Alhasil, Koperasi Pertanian Sri Rejeki lantas beramal gamasi menjadi KUD Tuntung Pandang dan sekaligus memperbaharui kepemimpinan.

Perkembangan KUD Tuntung Pandang cukup pesat, baik di bidang usaha maupun pertambahan jumlah anggota. "Atas prestasi tersebut, pada tahun 1980 KUD Tuntung Pandang pernah ditunjuk sebagai KUD-Model," tandas Karlian Cilan. 



Manfaatkan SRG dan Tingkatkan Kesejahteraan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti
www.bappebti.go.id